



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Siti Pratiwi Husain^a, Iwan S. Seber^b, Valentina Monoarfa^c

^{a, c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.

^b Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.100, Sasa, Kec. Ternate Sel., Kota Ternate, Maluku Utara 97712

Email: pratiwi.husain@ung.ac.id^a, bione.fe@gmail.com^b

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 09-01-2023

Revised 25-01-2023

Accepted 26-01-2023

Kata Kunci:

Sistem Pengendalian
Internal, akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa

Keywords:

*Internal Control System,
Accountability of
Village Fund
Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan survei kuesioner. Adapun responden dalam penelitian ini sebanyak 120 responden terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Kepala urusan Tata Usaha, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala urusan Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan Desa di seluruh Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada saat aparat desa menerapkan pengendalian internal yang baik maka akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa akan semakin efektif.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the internal control system on the accountability of managing village funds. The method used in this research is a quantitative approach. The type of data used in this research is primary data. With data collection techniques using a questionnaire survey. The respondents in this study were 120 respondents consisting of the Village Head, Secretary, Treasurer, Head of Administrative Affairs, Head of Planning Affairs, Head of Government Affairs, Head of Welfare Section, and Head of Village Service Section throughout Bongomeme District, Gorontalo Regency. The analysis technique used is a simple linear regression analysis technique. The results of this study indicate that the internal control system has a positive and significant effect on village fund management accountability. When village officials implement good internal control, the accountability of the village government in managing village funds will be more effective.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada desa atas status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan ditetapkan Undang-undang tersebut, desa diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus desanya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Dalam artian dana desa yang akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa. Otonomi desa diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan agar desa dapat mengelola sendiri keuangannya demi kesejahteraan masyarakat desa.

Dana desa menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel serta harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah desa harus memberikan pertanggungjawaban atas dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat dalam bentuk laporan keuangan agar dapat mempermudah pengalokasian dana tahun berikutnya.

Besarnya dana desa yang diterima oleh setiap desa memberikan kekhawatiran bagi banyak pihak. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan kegiatan pemerintah desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan sampai pada tahap evaluasi. Terdapat beberapa macam kesalahan yang dapat terjadi dalam pengelolaan dana desa terutama dalam pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kesalahan yang bisa terjadi yaitu kurangnya keterbukaan diantara pemerintah desa dengan badan pemusyawaratan desa dan atau masyarakat dalam baik dalam tahap perencanaan maupun penyusunan anggaran sampai pada tahap akhir evaluasi. (www.bpkp.com). Maka untuk dapat meminimalisir kesalahan kesalahan yang dapat terjadi dan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik diperlukan suatu sistem untuk dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa agar sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

Akuntabilitas harus dapat diwujudkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa, sehingga semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu yang dapat mendukung keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik di lingkungan pemerintah desa.

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat memberikan keyakinan terhadap pencapaian efektivitas, efisiensi dan ekonomi dalam pencapaian tujuan pemerintahan desa. Dengan sistem pengendalian internal yang efektif akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan desa, pengamanan aset-aset desa dan taatnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada akhirnya akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik bagi pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi awal yang diperoleh peneliti bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Bongomeme kabupaten Gorontalo masih belum optimal. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa tersebut yaitu lambatnya proses pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) yang berakibat pada tidak efisiennya waktu dalam pengelolaan keuangan desa yang diakibatkan oleh tidak optimalnya pengelolaan keuangan desa karena monitoring dan pengawasan dari pimpinan yang kurang. Hal dapat menimbulkan masalah dalam administrasi pengelolaan dana desa sehingga dapat mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa pada periode berikutnya.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dalam artian bahwa semakin diterapkannya sistem pengendalian internal akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriansah *et. al.* (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitiannya sejalan dengan agensi teori, dimana pemerintah desa sebagai agen dalam melaksanakan kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pertanggungjawaban secara efektif dan efisien. Dengan sistem pengendalian internal yang baik maka pemerintah desa sebagai agen dapat mencapai tujuannya secara efektif dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Adriansah *et. al.* (2022) namun memiliki perbedaan pada lokasi penelitian dan jumlah responden dan permasalahan yang berbeda pula yang ditemui di lokasi penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dalam sektor publik dimana pemerintah daerah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai prinsipal. Teori ini membahas hubungan keagenan dimana pihak prinsipal dalam hal ini masyarakat mengamanahkan tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan kepada pihak agen dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan tanggung jawab dari pekerjaan tersebut. Teori agensi dalam penelitian ini terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa sebagai pihak yang menjalankan amanah dari rakyat wajib memberikan dan menyajikan laporan keuangan mengenai pengelolaan dana desa. Kepala desa dan aparat desa sebagai penyelenggara dalam pemerintahan desa harus mampu melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi dalam pengelolaan keuangan dana desa serta menyampaikannya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban secara transparansi dan akuntabel.

Akuntabilitas

Menurut Mardiamo (2009:18) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik salah satu kewajiban pihak yang menjalankan amanah atau pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*). Akuntabilitas sebuah konsep yang lebih luas dari *stewardship*. Dimana teori *stewardship* mengarah pada pengelolaan suatu aktivitas secara efektif dan efisien tanpa harus dibebankan suatu kewajiban untuk melaporkan. Sedangkan akuntabilitas mengarah kepada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi amanah.

Pengelolaan Dana Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dikatakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri tersebut dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Sedangkan sekretaris desa, Kaur, dan Kasi juga Kaur keuangan sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa. Dengan mengemban tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa dalam Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk setiap tahun. Dana desa tersebut harus di kelola secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara efektif, ekonomis, efisien, transparan serta bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepatuhan dalam mengutamakan kepentingan masyarakat di desa tersebut.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Menurut Supadmi dan Suputra (2018) akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan sebuah pertanggungjawaban oleh pemerintah desa setelah mengelola dana desa sesuai dengan prosedur, kebijakan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa. akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja kepala desa kepada Bupati dalam bentuk laporan dengan prinsip bahwa setiap aktivitas terkait pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat desa pada khususnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kristianto, dkk. 2018)

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian internal Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hipotesis Penelitian

Sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan baik akan memberikan kepercayaan pada kualitas dan keandalan laporan keuangan sehingga akan memberi dampak baik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian:

H : Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini variabel bebas (independen) yaitu Sistem pengendalian internal (X) dan variabel terikat (dependen) yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa di Kecamatan Bongomeme, dimana pada Kecamatan Bongomeme terdapat 10 (sepuluh) desa. Sampel dalam penelitian ini adalah aparat yang terlibat sebagai pelaksana pengelolaan dana desa di kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari: Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara, unsur Kaur dan unsur Kasie. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampling jenuh dimana semua populasi digunakan sebagai sampel dengan jumlah 120 orang.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

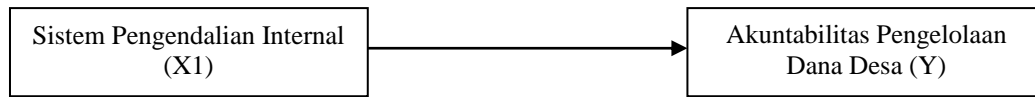
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan melalui metode distribusi langsung, yaitu memberikan langsung kepada responden kuesioner tersebut dan mengumpulkan kembali setelah kuesioner diisi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, pengujian validitas dan reliabilitas, uji normalitas data, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan model regresi linear sederhana, dan uji koefisien determinasi.

Adapun desain penelitian yang ditetapkan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:



Gambar 1. Desain Penelitian

Operasionalisasi Variabel

Tabel 1. Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel
Sistem Pengendalian Internal (X1)	Pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi (Budiantari dkk, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian internal (PP RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah)
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Variabel Y)	Akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/ pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (Sujarweni, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan, 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban (Sujarweni, 2015)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Hasil pengujian validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} (*tabel product moment*) dengan tingkat signifikansi 5% untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, diketahui n adalah jumlah sampel penelitian sebanyak n responden dengan r_{hitung} untuk menilai $df = n-2$, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka kuesioner tersebut dikatakan valid. Nilai r_{tabel} 0.361

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas

NO	Variabel X1		Variabel Y	
	R_{hitung}	Status	r_{hitung}	Status
1	0,452	Valid	0,899	Valid
2	0,464	Valid	0,580	Valid
3	0,557	Valid	0,486	Valid
4	0,528	Valid	0,664	Valid
5	0,630	Valid	0,899	Valid

Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas (Lanjutan)

NO	Variabel X1		Variabel Y	
	Rhitung	Status	rhitung	Status
6	0,517	Valid	0,814	Valid
7	0,465	Valid	0,899	Valid
8	0,383	Valid	0,548	Valid
9	0,373	Valid	0,519	Valid
10	0,521	Valid	0,404	Valid
11	0,459	Valid	0,690	Valid
12	0,872	Valid	0,720	Valid
13	0,771	Valid	0,728	Valid
14	0,413	Valid	0,566	Valid
15	0,608	Valid	0,457	Valid
16	0,857	Valid	0,899	Valid
17	0,398	Valid	0,518	Valid
18	-	-	0,518	Valid

Sumber: Olahan Data SPSS, 2022

Hasil pengujian reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan/pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu dan dapat dikatakan reliabel suatu variabel jika memiliki nilai *cronbach's Alpha* > 0.60. adapun hasil pengujian reliabilitas untuk variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas

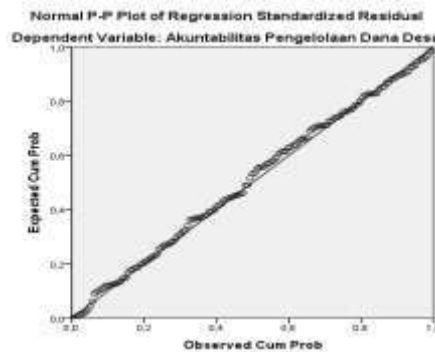
No	Variabel	Hasil Reliabilitas	Standar	Status
1	Sistem Pengendalian Internal	0,735	0.6	Reliabel
2	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,924	0.6	Reliabel

Sumber : Olahan Data SPSS,2022

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data diidentifikasi melalui metode *Normal Probability plot* dengan membandingkan distribusi kumulatif data sesungguhnya dengan data dari distribusi normal. Distribusi data dikatakan normal, maka akan menggambarkan garis daya yang sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Hasil uji normalitas data dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Gambar 2. Grafik *Normal Probability Plot*

Sumber : Olahan Data SPSS 20, 2022

Hasil Uji Persamaan Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka digunakan analisis regresi linear sederhana. Dimana variabel bebasnya adalah sistem pengendalian internal (X_1) dan variabel terikatnya adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berikut ini merupakan hasil uji regresi linear sederhana yang diperoleh dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	10.106	2.998		3.371	0,000
Sistem Pengendalian Internal	0,348	0,081	0,358	4.303	0,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Model persamaan regresi linier sederhana adalah:

$$\hat{Y} = 10.106 + 0.348X + \varepsilon$$

Berdasarkan model persamaan regresi tersebut, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 10.106 adalah nilai tetap yang artinya akuntabilitas pengelolaan dana desa jika tidak terdapat pengaruh dari variabel sistem pengendalian internal maka nilainya sebesar 10.106
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel sistem pengendalian internal (X_1) sebesar 0.348 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen pada variabel sistem pengendalian internal maka akan mempengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0.348. Nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H_{a1} diterima. Dapat disimpulkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) adalah mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Hasil pengujian koefisien determinasi R^2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,345 ^a	0,119	0,101	5,13612

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Olahan Data SPSS, 2022

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian menjelaskan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa di desa se kecamatan Bongomeme kabupaten Gorontalo telah melakukan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan sistem pengendalian internal yang baik dilakukan oleh pemerintah desa dapat memastikan bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, keandalan laporan keuangan lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan hasil ini maka yang perlu ditingkatkan dalam sistem pengendalian intern adalah komunikasi dan informasi dari seluruh elemen terkait dalam pengelolaan dana desa. Selain itu pada tahapan kegiatan pengendalian harus perlu untuk ditingkatkan agar pengelolaan dana desa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dapat terlaksana dengan baik dan dapat meminimalisis kesalahan-kesalahan yang terjadi

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Adriansah (2022) dan Walyati (2020) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan desa. Semakin baik sistem pengendalian internal maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 11,9% variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel sistem pengendalian internal. Dan sisanya sebanyak 88,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sistem pelaporan akuntansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparat desa. Sehingga kepada aparat desa agar dapat menjalankan amanat dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan terus meningkatkan kinerjanya agar seluruh rangkaian pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan baik.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat simpulan dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. Semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah desa maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintah desa se kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang kemudian peneliti titipkan kepada aparatur desa sehingga peneliti sulit dalam mengontrol jawaban responden apakah telah diisi dengan benar berdasarkan pernyataan yang diajukan. Sehingga pada penelitian selanjutnya agar metode penelitian dapat dilakukan dengan *mix method* untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah di kemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan yaitu: untuk pemerintah desa yang ada di Kecamatan Bongomeme untuk dapat terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desanya dengan meningkatkan pengendalian internnya serta pengawasan. Selain itu untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas lain yang diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Dwi Sapartiningsi, Suharno, Djoko Kristianto. Universitas Slamet Riyadi Surakarta (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- N.L Supadmi, D.G Dharma Suputra. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar (2018)

Republik Indonesia. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Polutu, Adriansah. Mattoasi. Usman. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, Volume 3 No. 2 .

Suwarjeni. (2015). *Panduan Tata Kelola Keuangan*. Pustaka baru Press.

Walyati, Fifit Nur. 2020. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan. *Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang*.